

# **BAB I**

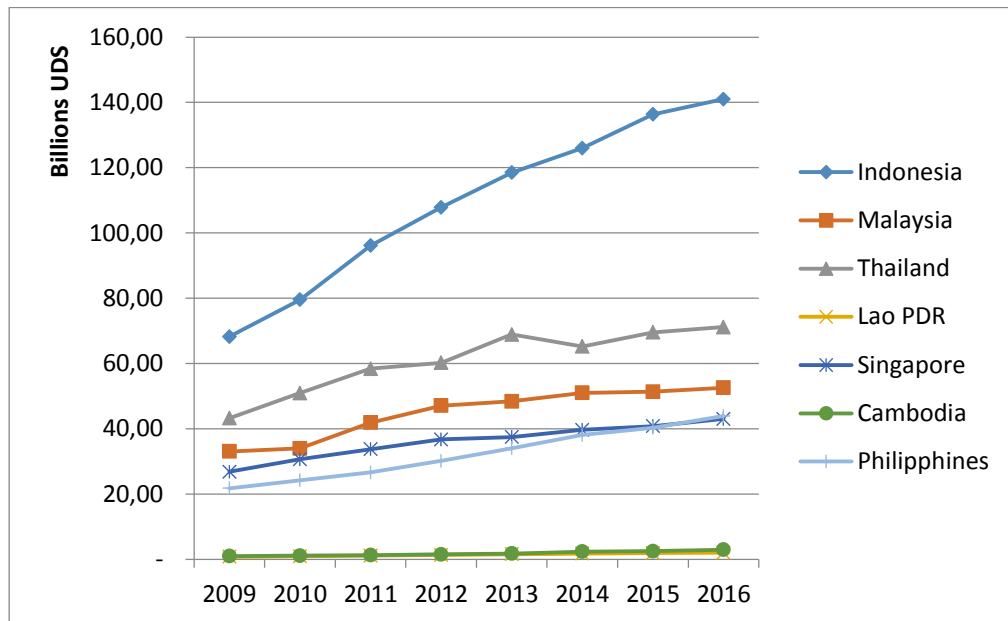
## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah dalam sebuah negara mempunyai tugas untuk dapat menjamin terselenggarakannya kesejahteraan rakyat. Hal ini diwujudkan dengan adanya pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas rakyat, bantuan pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya melalui dalam belanja pemerintah, hal ini tercermin di dalam struktur Anggaran Pemerintah (*Government Budget*).

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam pengeluaran pemerintah yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan (Gomanee, 2005). Pengeluaran pemerintah bersumber dari pendapatan pajak, non-pajak, pinjaman dan dana hibah.

Melihat di banyak negara, sumber penerimaan pemerintah yang terbesar bersumber dari pajak (Karya dan Syamsuddin, 2016a). Seperti terlihat pada grafik realisasi atas penerimaan pajak di 7 Negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, Singapura, Kamboja dan Filipina pada Gambar 1.1 berikut.



Sumber : Data World Bank, data diolah penulis, 2018

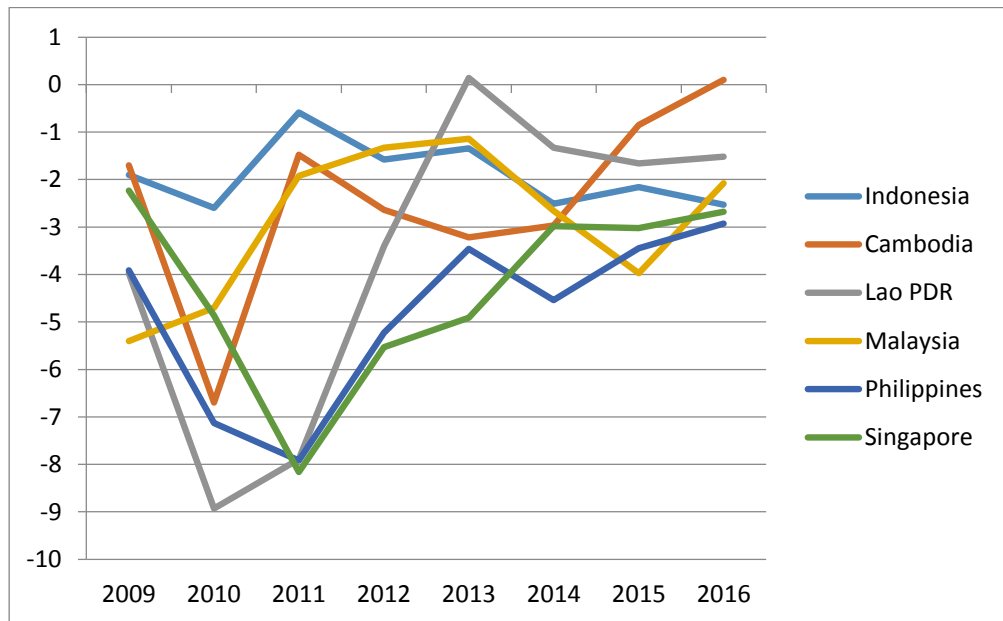
**Gambar 1.1 Pendapatan Pajak di 7 Negara Asia Tenggara**

Gambar 1.1 menunjukkan besar pendapatan pajak yang diterima dari tahun ke tahun 2009 hingga 2016 di 7 Negara Asia Tenggara. Pendapatan pajak di Indonesia meningkat dalam jumlah yang besar setiap tahunnya dari titik 68 miliar pada tahun 2009 hingga 141 miliar pada 2016 yang terhitung mengalami peningkatan sebanyak 107%. Peningkatan yang paling signifikan terjadi di Cambodia yang meningkat sebanyak 198% dari titik 992 juta pada tahun 2009 hingga 3 miliar di tahun 2016. Dan peningkatan yang paling sedikit terjadi di Malaysia yang meningkat sebanyak 59% dari titik 33 miliar pada 2009 hingga 52 miliar di tahun 2016. Secara garis besar, penerimaan pajak dari tahun 2009 hingga 2016 di 7 negara tersebut mengalami peningkatan yang stabil.

Peningkatan pendapatan pajak tersebut menggambarkan salah satu usaha pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Uhlig dan Yanagawa, 1996) karena pendapatan atas pajak suatu negara merupakan cara yang paling signifikan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Goodwin, dkk, 2013). Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh ungkapan Ojong, dkk (2016) bahwa pajak merupakan alat ekonomi yang paling kuat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran sosial.

Usaha pemerintah tersebut dilakukan dengan penetapan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan untuk memanipulasi penerimaan serta pengeluaran pemerintah yang dilakukan setiap tahun dengan menambah atau mengurangi variabel yang dapat dikontrol, yaitu pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan juga biaya transfer (Karya dan Syamsuddin, 2016b). Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang dimaksud adalah kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pendapatan pajak antara lain dengan menetapkan besarnya pajak dibandingkan dengan GDP negara.

Gambar 1.2 menunjukkan grafik atas ratio neraca fiskal terhadap GDP di 6 Negara Asia Tenggara (Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, dan Singapura), ratio tersebut menggambarkan kebijakan fiskal yang ditetapkan di 6 Negara Asia Tenggara tersebut di tahun 2009 hingga 2016 lalu. Kebijakan fiskal yang dimaksud adalah kebijakan menetapkan anggaran berimbang, anggaran defisit maupun sebaliknya.



Sumber : GovData360 World Bank, data diolah penulis, 2018

**Gambar 1.2 Ratio Neraca Fiskal terhadap GDP di 6 Negara Asia Tenggara**

Gambar 1.2 memperlihatkan ratio neraca fiskal terhadap GDP yang terjadi di 6 Negara Asia Tenggara yang didapatkan dari pembagian atas neraca fiskal masing-masing negara dengan GDP masing-masing negara. Neraca fiskal merupakan selisih atas pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah yang menunjukkan seberapa besar pemerintah membelanjakan pendapatan yang diterima, surplus akan terjadi saat pengeluaran pemerintah lebih kecil dari pendapatan yang diterima dan defisit akan terjadi pada kondisi sebaliknya (OECD, 2017). Posisi titik yang berada pada daerah positif (di atas nol) menggambarkan kondisi surplus anggaran negara di tahun tersebut, dan jika berada pada titik negatif (di bawah nol) maka titik tersebut menggambarkan kondisi defisit anggaran. Dan dapat kita lihat, secara garis besar titik atas ratio neraca fiskal terhadap GDP dari tahun 2009 hingga 2016 di

6 negara tersebut berada pada daerah negatif dengan peningkatan secara fluktuatif. Hal ini berarti kebijakan defisit anggaran merupakan kebijakan yang terus ditetapkan oleh banyak negara dari tahun ke tahun.

Defisit anggaran yang terjadi atas penetapan kebijakan fiskal dalam suatu negara akan ditutupi oleh pinjaman untuk menutupi kekurangannya (Hyman, 2014). Pernyataan serupa juga dipaparkan oleh Blanchard (2017) bahwa pemerintah akan melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan atas kebutuhan belanja pemerintah dan jika surplus anggaran terjadi, maka pemerintah akan menggunakan anggaran yang lebih tersebut untuk melakukan pembayaran atas hutang-hutang sebelumnya. Jika kita kembali pada Gambar 1.2, maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya akan terjadi peminjaman uang untuk menutupi kekurangan yang terjadi atas pengeluaran pemerintah di negara-negara tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah harus berhati-hati terhadap pola defisit anggaran, pola yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sulitnya penerimaan pinjaman asing atas antisipasi turunnya nilai tukar mata uang atau kemungkinan kemampuan negara dalam pengembalian yang semakin kecil yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Dornbusch, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis mengenai hubungan kausal antara pendapatan pajak serta pengeluaran pemerintah diperlukan. Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai hubungan kausal pendapatan pajak dengan pengeluaran pemerintah. Berdasarkan hasil

penelitian sebelumnya, hubungan kausal antara kedua variabel tersebut mengalami banyak perbedaan. Beberapa peneliti menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang memberikan pengaruh kepada pendapatan pajak, namun juga terdapat beberapa peneliti yang menyatakan sebaliknya. Ditemukan pula penelitian dengan hasil yang menyatakan bahwa kedua variabel berpengaruh secara bersamaan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti hubungan kausal antara pendapatan pajak dengan pengeluaran pemerintah di 4 Negara Asia Tenggara. Sampel penelitian dipilih berdasarkan negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam OECD yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura. Data penelitian merupakan data pengeluaran pemerintah dan pendapata pajak pada tahun 2004-2015. Penelitian ini mengangkat judul “Hubungan Kausal antara Pendapatan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah: bukti dari 4 Negara Asia Tenggara”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah perubahan pada pengeluaran pemerintah menyebabkan perubahan pendapatan pajak dalam jangka pendek dan panjang?” serta “Apakah perubahan pada pendapatan pajak yang menyebabkan perubahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan perubahan pendapatan pajak ataukah sebaliknya perubahan pendapatan pajak yang menyebabkan perubahan pengeluaran pemerintah.
- b. Untuk mengetahui apakah perubahan yang disebabkan bersifat jangka pendek atau jangka panjang atas kedua hubungan tersebut.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Menguatkan penelitian sebelumnya mengenai hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara pendapatan pajak dengan pengeluaran pemerintah, serta variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi antara kedua variabel tersebut.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk melakukan kritisi terhadap kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah serta diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai hubungan kausal antara pendapatan pajak dengan pengeluaran pemerintah.